

## **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Sabuk Hijau pada Kawasan Waduk Jatibarang**

Noni HD<sup>1</sup>SIP; Dr.Ir.Suharyanto<sup>2</sup>. MSc,Dra.Sri Suryoko.Msi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Pascasarjana Teknik Sipil, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Dosen FISIP dan Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro

### **ABSTRACT**

*This research aims at studying the Governmen's policy, citizen endeavors to participate in planning and participation in keeping Jatibarang Reservoir. Field research was conducted by implementing survey research, direct interview and observation. The respondents are from instances in government, consultant and communities around Jatibarang. For interview, there are 14 figures. While for prominent figures and communities are 70 ordinary people by survey in Kandri, Jatirejo, Kedungpane, Jatibarang sub-district. The data collecting used questionnaires, deep interview result and document result. Later on, the data obtained are analyzed using qualitative method and difference between prominent figures and communities.*

*The result of the research shows that there are some efforts taken by the government by dividing segment and pilot project in Jatibarang Reservoir Area. Besides, there are endeavors done by prominent figures and villagers. Participation level of the villages based on the village is different from the participation of prominent figures. The prominent figures possessing participation level on planning of the Jatibarang Reservoir Area as water resort area middle at participating compared to sub-district who have bad level of participation.*

*Thus, with the existence of participatory level difference between community and prominent figures, the endeavor or directly real act is needed to be plant on the programmes, both by the city government of holding a direct decision and activating the role of custom village.*

**Key words:** Planning, Participation, Conservation, Community, Reservoir.

## **1. PENGANTAR**

Pengelolaan lingkungan dalam pembangunan membutuhkan pendekatan perencanaan yang integratif. Dimana komponen pendukung pengelolaan lingkungan memiliki sifat dan ciri yang berbeda. Adanya keanekaragaman sifat dan ciri tersebut, membutuhkan pola pendekatan yang holistik, artinya suatu cara pandang masalah pembangunan dari berbagai disiplin ilmu yang terpadu dan proposional akan mampu memecahkan permasalahan tersebut.

Pengalaman menunjukan bahwa hanya sedikit keanekaragaman hayati mampu dilestarikan. Sebab banyak kebijakan yang berlaku sekarang seringkali memperkuat kecenderungan alamiah untuk mengeksploitasi sumberdaya hayati secara berlebihan. Akhirnya berbagai bencana bermunculan sebagai bentuk kemarahan alam atas perilaku manusia yang tidak memiliki visi dan misi keberlanjutan. Fenomena ini merupakan bentuk penyelewengan kewenangan dan tugas yang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Misalnya dalam konservasi Sumber Daya Air pengembangan Waduk Jatibarang melalui *Green Belt*. Ditemukan ada beberapa permasalahan yang harus diantisipasi sejak dini, jika tidak ingin terjadi hal negatif ke depan. Seperti wilayah sabuk hijau yang berada di daerah Cekungan Air Tanah (CAT) dan rentan terhadap gerakan batuan; rencana konstruksi bangunan wisata diindikasikan akan mempengaruhi kapasitas tampungan Waduk. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan peran serta masyarakat untuk meminimalisasi semua kemungkinan yang ada.

## **2. PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN**

Untuk menjaga keberlangsungan Waduk Jatibarang, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Sabuk Hijau menjadi hal harus sangat diperhatikan. Ditambah lagi karena kawasan ini merupakan daerah Cekungan Air Tanah (CAT) dan rawan terhadap gerakan tanah. Bagaimanapun kondisi lahan yang kritis dan rencana pengembangan kawasan wisata dapat memberikan permasalahan baru ke depan, apabila upaya minimalisasi yang dilakukan tidak ada. Oleh karena itu, dari beberapa poin di atas, perumusan masalah dan tujuan penelitian adalah seputar upaya yang dilakukan pemerintah, kendala dan upaya antisipasi yang dilakukan selama pelaksanaan kebijakan, serta besaran peran serta masyarakat.

### **3. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **3.1. Konservasi Sumber Daya Air**

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang (UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Sementara pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air (Pasal 1 ayat 4 PP No. Tahun 2011 tentang Sungai).

#### **3.2. Perencanaan dan Pengelolaan Waduk**

Dalam melakukan upaya pengelolaan Waduk, penanganan yang terintegrasi antara hulu-hilir, air permukaan dan air tanah, antar sektor maupun antar wilayah ini akan mendukung keberlanjutan fungsi dan mengoptimalkan manfaat Waduk. Pengelolaan daerah hulu dimaksudkan untuk mempertahankan laju sedimentasi yang akan masuk ke tampungan waduk sehingga dapat memperpanjang umur manfaat waduk. Konsolidasi antar wilayah dan antar sektor akan meminimalkan konflik antar pengguna air dan sekaligus menentukan peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Serta penguatan aspek kelembagaan yang diharapkan mampu mengakomodasi tanggungjawab pengelolaan asset yang ada.

#### **3.3. Sabuk Hijau**

Sabuk hijau merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi tumbuhan yang mengelilingi bendungan. Berfungsi untuk mencegah erosi dan pencemaran, sehingga waduk dapat berumur sangat panjang (biasanya diatas 50 tahun). Sementara maksud dan tujuan dari sabuk hijau adalah untuk konservasi ekologi dan kondisi sosiologi. Oleh karena itu, manfaat yang dapat diperoleh dari sabuk hijau adalah untuk kelestarian waduk ( konservasi air dan tanah); perlindungan kualitas air; dan kenyamanan

#### **3.4. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan**

Partisipasi masyarakat dalam teori perencanaan adalah dengan perencanaan transaktif. Perencanaan transaktif dan pembelajaran sosial juga akan membantu orang – orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebab menurut Hadi (2001), perencanaan bukanlah sesuatu yang terpisah dari bentuk- bentuk tindakan sosial (*social action*), tetapi merupakan proses yang terkait di dalam evaluasi yang terus – menerus dari gagasan melalui tindakan. Sehingga perencanaan yang efektif harus melibatkan masyarakat melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh oleh suatu kegiatan pembangunan.

### **4. METODOLOGI**

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tahapan penelitian pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam kepada instansi (Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana; PSDA Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah; BLH Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah; CTI Consultant) dan ketua LM2KSH (Lembaga Mitra Masyarakat Konservasi Sabuk Hijau) dengan jumlah total 14 orang. *Sampling* dengan pendekatan *purposive* kepada 70 orang responden yang terdiri dari 50 orang masyarakat biasa dan 20 orang tokoh masyarakat di Kelurahan Kandri, Jatirejo, Kedungpane dan Jatibarang. Serta telaah pustaka dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dan pembobotan (skoring).

### **5. HASIL DAN DISKUSI**

#### **5.1. Kronologi Proyek**

Pembangunan Bendungan Jatibarang merupakan uraian paket kesepakatan pengendalian banjir di Kota Semarang. Kesepakatan berbentuk IP-Loan 534 pada kegiatan *Integrated Water Resources and Flood Management Project* (IWRFM) yang terdiri dari tiga paket pengerjaan yakni Komponen A meliputi normalisasi BKB, normalisasi Kali Garang dan Bendung Simongan. Komponen B meliputi pengerjaan Konstruksi Bendungan Jatibarang ( B-1); Pembangunan PLTA Mini Hidro /Hydropower Station ( B-2); Pengelolaan Sabuk Hijau dan Pilot Project ; serta Pembangunan gedung pengelola dam dan tempat berjalan kaki (B-4). Komponen C meliputi Perbaikan Kali Semarang (C-1); Perbaikan Kali Asin (C-2); Pengembangan Sistem Drainase Bandarhardjo (C-3).

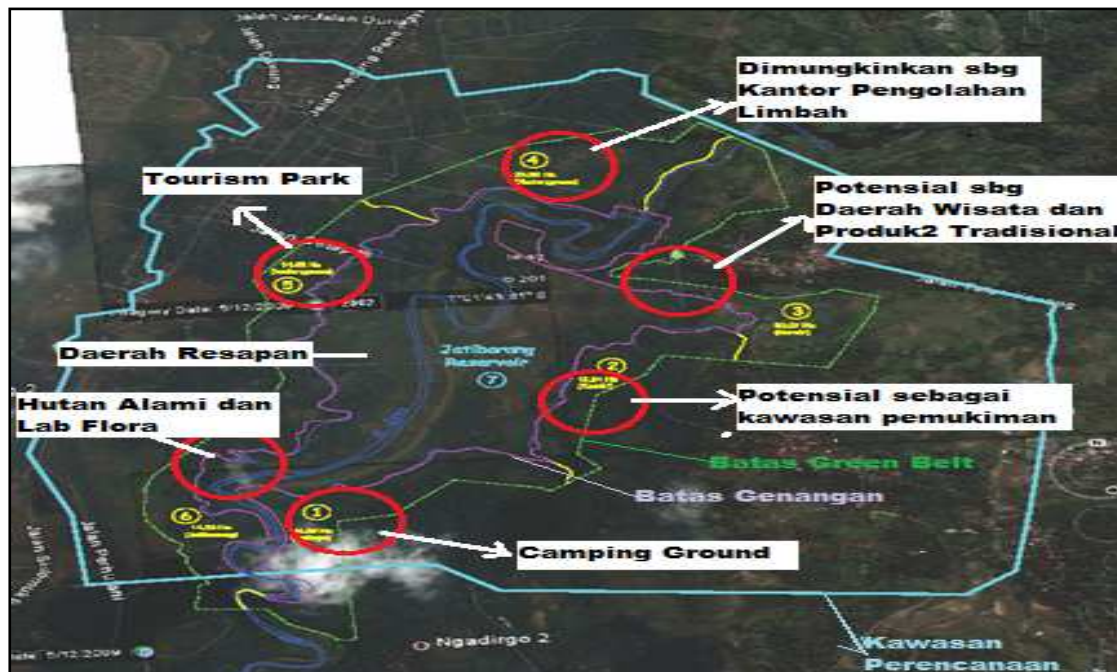
## 5.2. Upaya dan Kebijakan Pemerintah

1. Pembagian Segmen di Kawasan Sabuk Hijau yang akan diperuntukan untuk pengembangan Kawasan *Central Business Development* (CBA), Zona Taman Satwa dan Fasilitas Jogging Track, Zona Wisata Kebun Buah, Zona Flora dan Buah, Kawasan Desa Wisata Talun Kacang, Kawasan Wisata Goa Kreo, Kawasan Home stay dan fasilitas Gedung Serbaguna, dan *Camping ground*. Kawasan dengan luas 128,80 ha ini dibagi menjadi 6 segmen. Segmen 1 dan 6 akan dikembangkan menjadi kawasan arboretum. Segmen 2,4 dan 5 sebagai *agro-forestry*.

**Tabel 1. Pembagian dan Peruntukan Segmen Sabuk Hijau**

Segmen	Luas Wilayah ( ha)	Pengembangan Sabuk Hijau	Lokasi	Pilot Project
1	24,58	Arboretum	Jatirejo	Wisata buah dan penambahan beberapa fasilitas seperti Jogging track, 2 Gardu pandang, 5, Jalan Inspeksi
2	13,84	Agroforestry	Bukit Siwarak	Wisata air (toko souvenir, kolam anak-anak, Playground, Restaurant/Cafe, Sarang burung, Toilet, Mesjid, pelabuhan, Fasilitas memancing, Plaza/tempat pertunjukan, Gazebo, Sumur dalam, Menara keamanan, Aquarium, Out Bond dan ruang terbuka.
3	30,27	Eko- wisata	Talun Kacang	Perkampungan wisata (wisata kuliner, budaya dan pusat pengembangan bisnis)
4	14,53	Buffer zone dan agroforestry	Kedungpane	Wetland Pond
5	22,05	Buffer zone dan agroforestry	Kedungpane	Wetland Pond
6	22,05	Arboretum	Jatibarang	Wisata buah /botanical garden

Sumber : BWWS PJ



Sumber : BBWS Pemali Juana dalam Main Report

**Gambar Zona Pengembangan Kawasan Sabuk Hijau Waduk Jatibarang**

2. Pembentukan Kelompok Masyarakat pada Setiap Kelurahan.

Berdasarkan hasil dari *Forum of Group Discussion* (FGD) antara pemerintah, investor, komunitas masyarakat, pemerhati Waduk Jatibarang dan LSM. Maka disepakatilah untuk membentuk empat kelompok masyarakat di empat kelurahan yakni LM2KSH “Subur Makmur” di Kelurahan Kandri; LM2KSH “Sido Makmur” di Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Jatibarang.

**3. Program Pemulihan Pendapatan (*Income Restoration*).**

Sebagai akibat dari pembangunan Bendungan Jatibarang dan banyak jumlah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Maka pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah jajaran di bawahnya berupaya untuk Konsep tepat guna pengembangan Ekonomi Kawasan Waduk Jatibarang mampu menciptakan lapangan kerja; menggunakan lebih banyak tenaga manusia; pemeliharaan akan bisa dilakukan dengan mudah; menggunakan lebih banyak tenaga kerja dan bahan baku setempat; pemanfaatan modal setempat; menggunakan dan memanfaatkan teknologi menengah/madya; tidak boros menggunakan Sumber Daya Alam dan tidak mengganggu lingkungan hidup. Sementara model yang bisa diterapkan dalam pengembangan ekonomi adalah; Model I : Kelompok usaha ; Model II : Patungan kelompok usaha dan investor; Model III :Patungan investor dan kelompok usaha; Model IV : Kemitraan swasta; dan Model VI : Bank Tabungan Negara.

**4. Upaya Konservasi Monyet Ekor Panjang**

Akibat pembangunan Bendungan Jatibarang, selain berdampak pada pembebasan lahan, ternyata berdampak juga pada keberlangsungan habitat Monyet Ekor Panjang. Untuk menjaga kelestarian habitat monyet Pemerintah pusat telah bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada dalam melakukan upaya investigasi habitat ini ke depan.

**5. Tahapan Perencanaan Pelaksanaan Sabuk Hijau meliputi penyelesaian design Sabuk Hijau secara utuh, pelaksanaan *tender document*, pembuatan estimasi biaya, pembuatan *Time Schedule*.**

**5.3. Kendala – kendala yang dihadapi dan Upaya Mengatasinya**

**1) Pemerintah**

- Masih ada Lahan Peruntukan Sabuk Hijau yang Belum Terbebaskan seperti Tanah Aset milik Pemerintah Kota sebanyak 8 bidang seluas 103, 885m<sup>2</sup> Tanah milik kelompok Drs. Asminudin, Cs. Tanah milik warga di Kelurahan Jatirejo, Tanah aset milik Perhutani. Untuk mengantisipasinya akan ditempuh dengan konsinasi, karena sudah lebih dari 80 % lahan yang terbebaskan.
- Proses Relokasi SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dari 5 tower menjadi 12 tower yang belum kelar. Seperti Tower 11 yang terletak di lahan Bapak Andi Hartono di kawasan green belt. Upaya antisipasi dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Semarang untuk segera menerbitkan peta rincian tapak tower PLN dan berkordinasi dengan PLN dalam sosialisasi.
- Pencemaran oleh Villa Jatimas yang disebabkan Kompleks tersebut belum dilengkapi saluran pembuangan lingkungan. Kendala lainnya, kompleks ini sudah memiliki IMB dan peruntukannya sesuai dengan RTRW Kota Semarang tahun 2003-2018 dan terletak berbatasan dengan kawasan sabuk hijau. Bekerjasama dengan pemerintah kota Semarang.
- Relokasi Aset Gua Kreo seperti unit permainan anak – anak, mushola, panggung , gazebo ke Kebun Hewan Mangkang.

**2) Masyarakat**

- Biaya Operasional kelompok yang harus ditanggung bersama, karena belum ada pembiayaan dari pemerintah.
- Upah Tanam dan Pelobangan yang Rendah yakni Rp.4.500/ batang. Sehingga melibatkan masyarakat luar.
- Pelibatan Pihak Asing seperti mahasiswa KKN Unnes, para pekerja kontraktor.
- Belum adanya kejelasan kesepakatan tentang eksistensi Waduk ke depan.

**3) Umum**

- Kurang maksimalnya pengetahuan dari aparat pemerintah, dan ketua LM2KSH akan kronologi bendungan hingga sabuk hijau. Ini dipengaruhi oleh mutasi jabatan.

- Topografi yang curam, sehingga sulit untuk melobangi dan menanam. Serta kemarau yang panjang. Upaya mengantisipasi dengan melakukan penyiraman ke tanah dan tanaman yang akan ditanam lewat pipa dari aliran sungai Kreo.
- Permasalahan lahan kritis dan penambang tradisional liar di Kelurahan Purwosari tampaknya belum banyak diketahui oleh pemrakarsa. Namun oleh Pemkot Semarang menjadikan daerah ini sebagai prioritas penanganan lahan kritis di Kota Semarang.
- Upaya lain yang dilakukan adalah membuat Rancangan Peraturan Menteri bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan.

#### **5.4. Pandangan Masyarakat**

Pandangan masyarakat terhadap pembagian segmen, terhadap tahapan penanaman, terhadap program pilot project pengembangan wisata, dan terhadap income restoration. Semuanya menunjukkan bahwa tokoh masyarakat lebih mengetahui konsep program tersebut dibandingkan masyarakat biasa.

#### **5.5. Sikap Masyarakat**

Adapun hasil data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa semua tokoh masyarakat setuju dengan kebijakan tersebut. Serta hampir semua masyarakat setuju dengan upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah., yakni sebesar 39 orang atau sekitar 78%. Sementara sisanya mengikuti kebijakan pemerintah yakni 11 orang atau sekitar 22%.

#### **5.6. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat ini merupakan hasil dari metode pengumpulan data yang menjadi nilai variabel partisipasi masyarakat. Adapun tingkat partisipasi tokoh masyarakat dalam perencanaan sabuk hijau sedang. Dalam tahap perencanaan, mereka tidak dilibatkan. Semuanya dilakukan oleh BBWS dan konsultan. Masyarakat hanya dilibatkan saat menerima hasil perencanaan. Selain itu program pelatihan yang ditawarkan adalah program pelatihan yang sudah ada di Kota Semarang. Jadi masyarakat tinggal menyesuaikan bakat dan minat yang dimiliki dengan program yang tersedia. Pada tahap pelaksanaan, hampir semua tokoh masyarakat masuk sebagai anggota kelompok masyarakat konservasi sabuk hijau, terlibat dalam pelobangan, penanaman hingga pendataan untuk pelatihan *income restoration*. Sementara yang lainnya tidak, sebab mereka bukanlah warga terkena dampak pembangunan.

Hal yang sama juga hampir sama dengan masyarakat biasa, dimana hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum tingkat partisipasi yang dimiliki rendah atau jelek. Meskipun tiga kelurahan yakni Kelurahan Kandri, Kedungpane dan Jatirejo memiliki partisipasi yang sedang. Penyebab juga tergolong sama, kecuali untuk tingkat partisipasi dalam kelompok masyarakat dengan pelobangan dan penanaman tanaman yang berbanding terbalik. Ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang melihat bahwa harga pelobangan dan penanaman yang ditawarkan sangat rendah. Selain itu, mereka menunjukkan keenganan keluar dari rasa nyaman yang didapat akibat “ganti untung” proyek pembangunan Bendungan. Ada juga yang beranggapan bahwa yang seharusnya terlibat dalam pelobangan dan penanaman adalah kaum yang muda.

Hasil analisis partisipasi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tokoh masyarakat dan masyarakat tergolong rendah, yakni di kisaran 4,25 dan 3,2. Apabila tidak disikapi sejak awal, dikhawatirkan hal ini akan berdampak negatif pada keberlangsungan Waduk Jatibarang. Meskipun upaya pengelolaan dan pelestarian Waduk dilakukan dengan teknologi terbaik. Namun, rendahnya peran serta masyarakat akan berindikasi pada rendahnya tanggung jawab dan rasa memiliki pada Waduk.

### **6. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari Makalah ini adalah;

1. Upaya – upaya/program pemerintah meliputi pembagian segmen kawasan Sabuk Hijau menjadi 6 segmen; membentuk Kelompok Mitra Masyarakat Konservasi Sabuk Hijau (LM2KSH); melakukan upaya pemulihan pendapatan (*income restoration*) dengan pendekatan konsep dan model; konservasi terhadap monyet ekor panjang.
2. Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut terjadi berbagai kendala. Baik yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah misalnya belum terbebaskannya semua lahan peruntukan



*green belt* dan relokasi tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); pencemaran yang dilakukan oleh Villa Jatim. Kendala masyarakat seperti, ketidakjelasan sumber pendanaan operasional kelompok; adanya keterlibatan pihak asing diluar dari masyarakat kawasan Waduk Jatibarang; dan maintenance waduk yang belum jelas. Kendala umum yang dihadapi, misalnya kemarau panjang yang berakibat pada kegersangan lahan; kurang optimalnya pengetahuan seputar kronologi proyek oleh para *stakeholder* akibat waktu mutasi yang baru berusia satu hingga dua tahun. Serta penanaman pohon topografi yang curam.

- 3 Secara umum tingkat partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat dalam perencanaan kawasan Sabuk Hijau Waduk Jatibarang masih rendah. Pola top-down terkesan masih dipakai dalam kebijakan. Masyarakat lebih bersikap menerima semua hasil perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan konsultan

Sementara Saran dari Makalah ini adalah:

- 1) Upaya perencanaan hendaknya dilakukan dengan pendekatan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat, bukan sekedar pemaparan.
- 2) Apabila harga melobang dan menanam tidak dimungkinkan untuk bertambah. Dapat dilakukan bentuk win win solution dengan cara memberi kesempatan kepada WTD untuk memberdayakan kembali lahan miliknya.
- 3) Apabila minat WTD rendah, dapat dibuka kesempatan kepada masyarakat bukan-WTD yang berada di sekitar Waduk Jatibarang. Sehingga rasa memiliki dan bertanggung jawab dapat tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

## 7. REFERENSI

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dalam makalah “Bahan Rapat BBWS Pemali Juana dengan Walikota Beserta Jajarannya” pada 2 Februari 2012, Semarang.

Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dalam makalah “Konsep Pengelolaan Sabuk Hijau Waduk Jatibarang” pada 14 oktober 2011, Semarang

\_\_\_\_\_ “Pengadaan tanah Relokasi Tapak Tower PLN dalam Rangka Pembangunan Waduk Jatibarang”, Tahun 2012. Semarang.

\_\_\_\_\_ “Program Pemulihan Pendapatan (*Income Restoration*) WTD Pembangunan Waduk Jatibarang, Tahun 2012. Semarang.

CTI Consultant .2007. Main Report Green Belt.BBWS Pemali Juana,Semarang.

Dahlan, Tri Andari.2007.*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Proyek Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,Universitas Diponegoro, Semarang.

Hardhani,2001, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan*, Tesis Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hadi, Sudharto, 1997, *Bahan Kulian Metodologi Penelitian Sosial Kuantitatif, Kualitatif, dan Kaji Tindak*, Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hartanto.2001. *Persepsi, Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap Air Sungai (Studi Kasus Program Kali Bersih di Kaligarang- Jateng)*. Disertasi Program Pascasarjana IPB,Institut Pertanian Bogor, Bogor.

PP No.37 Tahun 2010 tentang Bendungan.

PP No.42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

PP No 82 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Soemarwoto, 1994.*Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

SNVT Pembangunan Bendungan Jatibarang pada makalah “ Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Jatibarang Status 2011 “.Semarang